



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**UNIT KERJA** : KECAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : MAY FADLY
- Jabatan** : LURAH SUNGAI PINANG DALAM
- NHK** : 752973

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 450.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 450.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 184.500.000

- MOTOR, YAMAHA MIO/SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
- MOBIL, DAIHATSU AYLA 1.2 SEG Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
- MOTOR, YAMAHA LEXY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 3.650.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 15.025.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 653.175.000

**III. HUTANG** Rp. 205.782.772

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 447.392.228

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**UNIT KERJA** : KECAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MIRA RAHARJA  
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN SENGKOTEK  
3. NHK : 826129

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 97.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU AYLA AYLA/MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000  
2. MOTOR, HONDA HONDA VARIO/SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000  
3. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 7.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 454.500.000

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 454.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**UNIT KERJA** : KECAMATAN LOA JANAN ILIR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUSHADI ANNUR
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
3. NHK : 489456

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>260.000.000</b>
1. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
2. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>84.840.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.769.277</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>77.000.000</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>432.609.277</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>442.824.866</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>-10.215.589</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**UNIT KERJA** : KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IPAN FAHRUDI  
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
3. NHK : 658302

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 77.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 77.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 47.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 1YD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000  
2. MOBIL, SUZUKI SL410 Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000  
3. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 11.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 135.000.000

**III. HUTANG** Rp. 50.148.925

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 84.851.075

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.